



**TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN TANPA IZIN EDAR  
UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 13/PID.SUS/2019/PN SLW)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO  
NPM. 5117500154**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN TANPA IZIN  
EDAR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN  
ECERAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13 /PID.SUS/2019/PN.  
SLW)**

**Disusun Oleh :**

**MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO  
NPM. 5117500154**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. SANUSI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0609086202**

**Pembimbing II**

  
**H. TONTIARYADI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0020045801**

# **PENGESAHAN**

## **JUDUL SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI PANGAN TANPA IZIN EDAR  
UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 13 /PID.SUS/2019/PN. SLW)**

Oleh :

**MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO  
NPM 5117500154**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Februari 2021

Penguji I



**IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0625058106

Penguji II



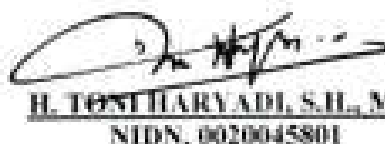
**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H**  
NIDN. 0619058703

Pembimbing I



**Dr. H. SANUSI, S.H., M.H**  
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



**H. TONHARVADI, S.H., M.H**  
NIDN. 0020045801

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



**Dr. H. Achmad Iqbal Hamzani, S.H.L., M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohamad Ilham Satrio Prakoso**  
NPM : 5117500154  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 28 April 1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar  
untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran (Studi  
Putusan 13/Pid.Sus/2019/PN Slw).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 22 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

**M. Ilham Satrio Prakoso**

## ABSTRAK

**Prakoso, Mohamad Ilham Satrio.** *Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran (Studi Putusan 13/Pid.Sus/2019/PN Slw).* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021.

Berbagai macam produk pangan harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk pangan olahan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk pangan. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum memproduksi pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM dan penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan hukum memproduksi pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM yang bersifat publik di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91. Penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/ PN Slw, sudah benar dalam menerapkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Terkait dengan pengaturan dan berlakunya izin edar sesuai dengan asas penafsiran hukum, maka pada peraturan tersebut berlaku *asaslex specialis derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum walaupun susu kambing etawa “Aumom” yang diproduksi terdakwa merupakan produk industri rumah tangga pangan.

**Kata Kunci:** memproduksi, pangan, izin edar dan kemasan.

## ABSTRACT

**Prakoso, Mohamad Ilham Satrio.** *The Crime of Producing Food Without a Distribution Permit to be Traded in Retail Packaging (Study of Decision 13/Pid.Sus/2019/PN Slw).* Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal. 2021.

Various kinds of food products must go through various conditions and procedures to be marketed to the public. One of them is that the processed food product must include a distribution permit number for the use of food products. If they are not careful in choosing the desired food product, consumers will only become the object of exploitation by irresponsible business actors.

This study aims to examine the legal regulation of producing food without a distribution permit at Balai Besar POM and the application of the criminal act of producing food without a distribution permit to be traded in retail packaging in Decision No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw. This type of research uses library research with a normative juridical approach. The main data source is secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results of this study concluded that the legal regulation of producing food without a distribution permit at the Balai Besar POM which is public in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 111 paragraph (2) and Law no. 18 of 2012 concerning Food Article 91. The application of the criminal act of producing food without a distribution permit to be traded in retail packaging in decision no. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw, it is correct in applying Article 142 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, namely that the Defendant is legally and convincingly proven to have committed a criminal act by intentionally producing food without a distribution permit to be traded in retail packaging. Regarding the regulation and the validity of the distribution permit in accordance with the principle of legal interpretation, the regulation applies the principle of *lex specialis derogate legi generalis*, which means that special laws override general laws, even though the "Aumom" goat's milk produced by the defendant is a home industry product. food.

**Keywords:** producing, food, distribution permit and packaging.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua keluargaku, yang telah mengisi hari-hariku dengan bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
4. Almamater UPS Tegal.

## MOTTO

1. Kebebasan adalah hak untuk melakukan apa pun izin hukum. **Montesquieu**
2. Sesuatu yang ilegal dilakukan dengan segera. Sesuatu yang inkonstitusional membutuhkan waktu yang lebih lama. **Henry Kissinger**
3. Pekerjaan yang dilakukan secara ilegal di luar ruangan atau tanpa izin terasa seperti kebebasan murni bagi saya. Saya mengerti bagaimana hal itu dapat mengganggu banyak orang di masyarakat kita, tetapi dalam gambaran yang lebih besar, ini pada akhirnya adalah tentang kebebasan. Kita hidup di masa di mana ruang publik telah menjadi komoditas bagi perusahaan untuk mengendalikan dan mendikte apa yang dilihat dan didengar. **Barry McGee**



## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran (Studi Putusan 13/Pid.Sus/2019/PN Slw).” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 22 Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
 BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	 18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Industri Rumah Tangga Pangan .....	30
1. Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan .....	30
2. Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga .....	31

3. Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga .....	31
4. Perisinan Usaha Pangan Produk Industri Rumah Tangga .....	34
C. Tinjauan Umum tentang Pangan dalam Kemasan .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pengaturan Hukum Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar pada Balai Besar POM .....	43
B. Penerapan Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran pada Putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	63

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan bagian hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sebab pangan sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia dengan cukup, bermutu, aman, bergizi, dan beragam yang dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat.

Pengertian pangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energy bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan juga dapat diartikan sebagai bahan sumber gizi. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok (*basic need*).<sup>1</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Seiring kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi sekarang ini banyak berdampak pada perkembangan bidang perindustrian dan

---

<sup>1</sup> Kanza, Aulfa Aulia & Umar, Sukma Chaedir, *Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*, Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015, hlm. 2.

perdagangan yang pada akhirnya menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>2</sup> Adanya berbagai variasi barang dan jasa menjadikan perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak pula pada perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman yang beragam variasi produk yang biasa dikonsumsi.

Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun yang bergerak dalam suatu pengambilan kebijakan. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan. Di samping itu setiap orang dalam posisi tertentu baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan konsumen sehingga kedudukan konsumen tidak aman atau lemah.<sup>3</sup>

Produk-produk pangan sebelum dipasarkan harus mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hal ini untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Jadi produk pangan yang tidak didaftarkan di BPOM dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena bisa

---

<sup>2</sup> Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 177.

<sup>3</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

membahayakan masyarakat konsumen, dan produk pangan tersebut disita untuk dimusnahkan oleh BPOM karena tidak terdapat label izin edar yang termasuk barang ilegal yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan.

Kurangnya kesadaran, rendahnya pengetahuan tentang hukum, masih kurangnya penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual produknya yang membuat pelaku usaha hanya mencari keuntungan semata.<sup>4</sup> Pentingnya izin edar produk pangan olahan kemasan baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Manfaat izin edar produk bagi Pengusaha Pangan, yaitu melegalkan produk pangan olahan kemasan yang diedarkan di pasaran dan produk yang sudah legal akan mendapatkan kepercayaan konsumen dan pasar. Sementara itu, manfaat izin edar produk pangan olahan kemasan bagi konsumen, yaitu: konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan yang aman, bebas cemaran kimia, biologi dan fisik; konsumen memperoleh informasi tentang produk; serta konsumen terhindar dari segala bentuk kerugian.<sup>5</sup>

Tidak semua pelaku usaha memperhatikan pentingnya izin edar, masih ditemukannya beberapa produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yang diperjual belikan. Keadaan Indonesia saat ini dengan muncul pandemik corona virus, dampak adanya pandemik ini salah satunya yaitu berkurangnya

---

<sup>4</sup> Suriati, Eni., Darmawan, & Mansur, Teuku Muttaqin, "Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, hlm. 502-503.

<sup>5</sup> Nurcahyo, Edy, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, September 2018, hlm. 407.

aktivitas perdagangan dalam pemenuhan pangan secara tatap muka sehingga aktivitas jual beli dilakukan secara *online*. Selama pandemi Covid-19, hasil operasi dan analisa intelijen Badan POM menunjukkan terjadinya perbedaan pola konsumsi dan distribusi melalui media *online*.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penjualan secara *online* pada bulan April 2020 bahkan melonjak hingga 480%. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan obat dan makanan untuk mengedarkan obat dan makanan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan melalui media *online*. Berdasarkan hasil kinerja patroli siber obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM, terjadi peningkatan jumlah tautan/situs yang teridentifikasi mengedarkan obat dan makanan ilegal. Pada tahun 2019, Badan POM berhasil mengidentifikasi 24.573 tautan penjualan obat dan makanan ilegal. Jumlah ini meningkat hampir 100% menjadi 48.058 tautan selama semester I 2020.<sup>6</sup>

Di Indonesia seluruh produk makanan yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya dianggap sudah aman dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium. Hal tersebut juga didasarkan karena semua produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/563/3-2-Miliar-Rupiah-Obat-Tradisional-dan-Pangan-Olahan-Ilegal-Ditemukan-di-Bekasi.html>, Online tanggal 2 Februari 2021.

<sup>7</sup> Pamory, Novri Dimas, "Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar", *Jurnal Ilmiah* (Vol. 4. No 2, Maret 2016, hlm. 10).

Berbagai macam produk pangan harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk pangan olahan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk pangan. Izin edar pangan olahan diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (2) menyatakan makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Adapun ketentuan izin edar bagi pelaku usaha yang menjual pangan olahan secara *daring*, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pangan Olahan yang diedarkan secara *daring* wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab seperti kasus yang terjadi pada perkara Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Slw, Terdakwa Nur Maghfirotus Sholikha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label.



Terdakwa melalui karyawannya melakukan pengemasan terhadap produk Aumom susu kambing Etawa yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang dengan mencantumkan Nomor BPOM Reg. 60311001204 yang merupakan nomor fiktif karena seharusnya nomor izin yang tercantum di dalam label adalah POM MD kemudian diikuti 12 kombinasi nomor dari Badan POM dan setelah saksi Firman (petugas BBPOM Jateng, Semarang) mengecek melalui website Badan POM RI tidak menemukan produk Aumom susu kambing Etawa yang terdakwa produksi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam hal ini sebelum produk-produk Pangan dipasarkan harus mendapat izin edar dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen serta Pangan yang tidak didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena bisa membahayakan masyarakat konsumen. Mencermati hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran (Studi Putusan 13/Pid.Sus/2019/PN Slw).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum memproduksi pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM?

2. Bagaimana penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum memproduksi pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM.
2. Untuk mengkaji penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan hukum pidana mengenai izin edar pangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana dalam kajian memproduksi dan peredaran pangan tanpa izin edar serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.
2. Secara praktis, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum memproduksi dan mengedarkan pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan rupiah serta sanksi hukumnya sehingga dapat mencegah

masyarakat dalam melakukan tindak pidana pengedaran pangan secara ilegal, serta dapat memberi manfaat kepada konsumen dalam memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi yaitu pangan yang telah mendapatkan izin edar dari BB POM.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

1. Ilat,<sup>8</sup> “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum dan pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman. Metode penelitian yuridis normative.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pengaturan hukum pengamanan peredaran makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan, pangan dan konsumen pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar terjamin keamanannya, sesuai dengan standar dan/atau persyaratan kesehatan, memiliki izin edar dan setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>8</sup> Ilat, Rivalno Daniel, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”, *Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Jan-Maret 2015*, hlm. 114-122.

berlaku. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman terhadap perseorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan dapat dibuktikan melalui pemeriksaan di pengadilan.

2. Nasution,<sup>9</sup> “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online. Metode penelitian hukum empiris.

---

<sup>9</sup> Nasution, Saripa Hannum, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, Desember 2020, hlm. 65-79.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dilindungi hak-haknya dalam beberapa undang-undang dan pada dasarnya konsumen telah mengetahui mengenai pentingnya izin edar suatu produk pangan olahan frozen food tetapi konsumen belum sepenuhnya mengetahui mengenai adanya perlindungan konsumen, serta berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yaitu bahwa sikap pertanggungjawaban pelaku usaha sudah sesuai dengan Pasal 19 UUPK.

3. Lestari, Suradi & Njatrijani,<sup>10</sup> Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Korespondensi data Sumbernya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang melalui Layanan Informasi Konsumen dan Staf Investigasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang. Data yang dikumpulkan adalah primer, yang dikumpulkan dari proses wawancara, dan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan peraturan tentang penyebaran produk makanan yang tidak terdaftar. Pemerintah membentuk juga Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Pusat pengendalian, pengawasan, dan pelepasan nomor registrasi produk pangan kemasan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Lestari, Desy., Suradi, & Njatrijani, Rinitami, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 1-11.

Indonesia yang baru. Upaya yang dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan adalah pengendalian premarket, yaitu pengendalian sebelum produk diedarkan ke pasar, dan pascapasar. control, yaitu pengendalian setelah produk didistribusikan ke pasar. Sanksi bagi pelakunya pelakunya adalah sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif berdasarkan Hukum Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

4. Nurcahyo,<sup>11</sup> Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan izin edar serta bentuk pengawasan produk makanan industri pangan kemasan. Banyaknya produk pangan yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk pangan sangat penting untuk menjaga keamanan pangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum produk industri pangan diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan

---

<sup>11</sup> Nurcahyo, Edy, Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, September 2018, hlm. 402-417.

dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif.

5. Pakpahan, Leviyanti, Widiyani, dan Chandra,<sup>12</sup> Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar, Peran negara penting dalam mewujudkan pengaturan ketersediaan untuk pemenuhan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan makanan tanpa izin dan upaya pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, metode yuridis normatif, menganalisis data dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap makanan olahan sebelum beredar ditengah masyarakat harus terlebih dahulu memiliki izin edar dan diberi label sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 secara tegas mengatur mengedarkan makanan olahan tanpa izin serta perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan olahan telah terjamin sesuai standar mutu dan keamanannya dan telah memenuhi persyaratan kesehatan. Makanan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan ditarik dari peredaran, dilakukan penyitaan agar

---

<sup>12</sup> Pakpahan, Kartina., Leviyanti., Widiyani, Heni,m dan Chandra, Ferris., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 1, April 2020, hlm. 1-12.

dimusnaskan, dilarang untuk diedarkan dan dicabut izin edarnya. Korporasi dapat bertanggung jawab atas pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tanpa izin mengedarkan makanan olahan diberlakukan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdapat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan adanya unsur kesalahan. Korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban, dapat dibebankan pada pengurusnya dalam rangkaian perbuatan lingkup Korporasi. Hukuman yang dapat diberikan pidana denda dan pidana penjara pada sidang di pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang pangan. Melalui beberapa tahapan peradilan. Kepada korporasi dapat diberikan sanksi larangan melakukan aktivitas tertentu, larangan mengikuti tender dan memproduksi barang-barang tertentu, tidak diijinkan melakukan kontrak serta pemasangan advertensi hingga pencabutan izin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai



literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>13</sup> Penelitian ini tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan.

Penulis mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman untuk mendeskripsikan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dibangun mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.<sup>15</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>13</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu semua perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>16</sup> Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.<sup>18</sup> Sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian terkait dengan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar.

---

<sup>15</sup> Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

<sup>16</sup> Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

<sup>17</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

<sup>18</sup> Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>20</sup> Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.<sup>21</sup> Oleh karena sumber data utama berupa data sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

#### 5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>22</sup> Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>21</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

<sup>22</sup> Muhammad, Abdukadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini.

Bab I   Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II   Tinjauan Konsepsional. Memaparkan teori-teori terkait permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang industri rumah tangga, dan tinjauan umum tentang pangan dalam kemasan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan hukum memproduksi pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM dan penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana, dalam bahasa Belanda diterjemahkan menggunakan istilah “*strafbaarfeit*”. Istilah “*strafbaarfeit*” terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.<sup>24</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Simons dirumuskan sebagai, suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>25</sup> *Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan

---

<sup>23</sup> Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 32.

<sup>24</sup> Ariman, M. Rasyid dan Raghil, Fahmi., *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 58.

<sup>25</sup> Ariman, M. Rasyid, dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 67.

sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>26</sup> Pendapat lainnya dikemukakan Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa *strafbaarfeit* itu. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang dalam bahasa latin disebut *delictum*.<sup>28</sup> Untuk memahami tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah ppidanaan. Secara umum ppidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang

---

<sup>26</sup> Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 97.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>28</sup> Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 47.

dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang berhubungan dengan kesalahan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana sendiri perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan itu.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Kanter dan Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi, antara lain:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>30</sup>

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Penjelasan sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam

---

<sup>29</sup> Effendi, Erdianto, *Op Cit*, hlm. 99.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 99.



hatinya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), macam-macam maksud (seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu), perasaan takut (Pasal 308 KUHP), dan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri pelaku seperti sifat pelanggaran, kualitas pelaku, dan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud percobaan, macam-macam maksud kejahatan, perasaan takut dan pelaku mampu bertanggung jawab.

---

<sup>31</sup> Gunaidi, Ismi dan Efendi, Joenadi., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hlm. 40.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Eddy O.S. Hiariej,<sup>32</sup> secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan M.v.T, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Sebaliknya pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar termasuk delik kejahatan, karena perbuatan mengedarkan suatu barang yang tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang melanggar tata hukum dan dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

#### b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah 'perbuatan' itu sendiri. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 97-113.

delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Pada kasus tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar termasuk delik Formil. Artinya perbuatan dengan dilakukannya perbuatan yaitu memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut telah dianggap sebagai tindak pidana tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

c. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delik komisi (*commisionis*) adalah delik aktif yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Delik omisi (*omissionis*) adalah delik pasif yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Delik *Comissionis per ommissionen commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik komisi karena dalam hal ini telah terjadi perbuatan aktif yang merupakan pelanggaran terhadap larangan yaitu Pasal 144, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak, sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Delik abstrak dirumuskan secara formal dan tidak mementingkan akibat. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil.

Kasus tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar termasuk delik abstrak karena perbuatan dengan dilakukannya perbuatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut menimbulkan bahaya yang masih abstrak dan dirumuskan sebagai delik formil yaitu telah dianggap sebagai tindak pidana tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

e. Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sebagai misal Pasal 449 KUHP. Pasal 449 KUHP adalah *delicta propria*. Demikian pula kejahatan jabatan yang diatur dalam KUHP termasuk *delicta propria*.

Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik umum karena tindak pidana tersebut

dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memerlukan kualifikasi atau jabatan tertentu.

f. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik merugikan adalah delik yang demikian dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung. Delik menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) adalah delik yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung.

Tindak memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) karena tidak merugikan atau menyakiti secara langsung.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang jika tindakan yang dilakukan itu hanya satu kali saja, untuk mana pelaku dipidana. Delik lanjutan merupakan delik yang jika tindakan yang dilakukan secara berulang dan dapat dianggap sebagai kelanjutan dari delik semula. Dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan delik berdiri sendiri karena sekali saja perbuatan tersebut

dilakukan pelaku sudah dapat dipidana. Namun, karena perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai delik lanjutan.

h. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik persiapan atau *voorbereidings delicten* ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku. Delik percobaan sesungguhnya bukanlah memperluas suatu rumusan delik. Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa percobaan bukan delik selesai. Delik selesai (*aflopendedelic*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan *voortdurende delicten* atau delik-delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik selesai karena perbuatan tersebut telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Namun, karena perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai delik lanjutan.

i. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Delik gabungan adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik tunggal karena pelaku sudah dapat dipidana cukup hanya sekali saja dia melakukan perbuatan tersebut.

j. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan. Misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Delik biasa berarti ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik biasa karena perbuatan tersebut telah dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa harus menunggu adanya aduan dan tanpa melihat akibat yang ditimbulkan karena dalam perbuatan tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap larangan.

k. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delict* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik-delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delict* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Misalnya Pasal 372 KUHP, yang merupakan delik sederhana tentang penggelapan dan Pasal 374 KUHP, yang merupakan delik terkualifikasi yang biasanya dikenal dengan penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar merupakan delik sederhana karena dalam tindak pidana ini merupakan bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang dan tidak terdapat keadaan tertentu atau terkualifikasi.

l. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Delik Kesengajaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Delik Kealpaan merupakan suatu kesalahan yang berbentuk kealpaan. Tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan delik kesengajaan karena dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa sediaan farmasi dapat menimbulkan akibat yang membahayakan bagi pemakainya dan pelaku menghendaki perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tersebut terjadi.



## **B. Tinjauan Umum tentang Industri Rumah Tangga Pangan**

### **1. Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan**

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Pasal 6 ayat (1), Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: “Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka 16. Usaha rumah tangga pangan adalah rumah usaha produk barang atau jasa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah atau mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).

Berdasarkan pengertian-pengertian industri rumah tangga di atas dapat disimpulkan bahwa, industri rumah tangga (*home industry*) pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Jadi industri rumah tangga pada intinya kegiatan industri dilakukan di rumah tangga, tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang dan peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

## **2. Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga**

Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa: “Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini”. Cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) adalah:

- a. Lingkungan Produksi, untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksi.

- b. Bangunan dan Fasilitas IRT, dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.
- c. Peralatan Produksi, tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan seharusnya didisain, dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.
- d. Suplai Air, air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.
- e. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi, diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.
- f. Pengendalian Hama, hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.
- g. Kesehatan dan Higiene Karyawan, yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.
- h. Pengendalian Proses, untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penetapan spesifikasi bahan baku;
  - 2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
  - 3) Penetapan cara produksi yang baku;
  - 4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
  - 5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.
- i. Label Pangan, harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan.
- 1) Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
  - 2) Keterangan pada label sekurang-kurangnya: nama produk-daftar bahan yang dihasilkan (komposisi), berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
- j. Penyimpanan, yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT), antara lain meliputi lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air, pengendalian hama, kesehatan dan hidigene karyawan, pengendalian proses, label pangan, dan penyimpanan.

### **3. Perisinan Usaha Pangan Produk Industri Rumah Tangga**

Kegiatan produksi makanan, minuman dan obat-obatan harus memiliki izin produksi dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produk makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki izin produksi. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sertifikat tersebut terbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala BPOM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT, serta menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Daerah yaitu Dinas Kesehatan. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan. Sehingga produk makanan Industri Rumah Tangga dalam posisi strategis dan sehat.

Pendaftaran Pangan olahan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 2-4 dan Pasal 10. Ketentuan tersebut memuat:

- a. Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.
- b. Industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Syaratnya ialah:
  - 1) diproduksi oleh industri rumah tangga pangan;
  - 2) mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
  - 3) diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan: sampel dalam rangka permohonan pendaftaran; penelitian; konsumsi sendiri;
  - 4) digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
  - 5) yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan/atauf. pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.
- c. Pihak yang memproduksi harus memiliki izin usaha sesuai jenis pangan yang diproduksi.
- d. Memenuhi persyaratan cara produksi Pangan yang baik untuk jenis Pangan yang didaftarkan.

Pelaku usaha Industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT wajib untuk tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Jangka waktu berlakunya SPP-IRT adalah lima tahun dan wajib diperpanjang apabila masa berlaku SPP-IRT telah habis batas

berlakunya dan tidak diperpanjang oleh pelaku usaha. Produk pangan dengan masa SPP-IRT yang telah habis masa berlakunya maka dilarang diperjualbelikan. Pihak Dinas Kesehatan akan mengeluarkan 2 sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT. Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang di produksi adalah:

- a. Susu dan hasil olahannya,
- b. Daging, ikan unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku,
- c. Makanan kaleng,
- d. Makanan bayi,
- e. Minuman beralkohol,
- f. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan),
- g. Makanan/minumana yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standart Nasional Indonesia),
- h. Makanan/Minumana yang ditetapkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumahan yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan sanksi berupa penutupan industri, penarikan semua barang hasil industri yang beredar di pasaran, dan pelarangan izin beredar. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dimaksud sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT. Sedangkan Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT

Secara garis besar tata cara atau prosedur penyelenggaraan sertifikasi Produksi pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terdiri dari :

a. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi:

- 1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut: nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl), komposisi, tahapan produksi, nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRT, nama pemilik, nama penanggung jawab, informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa), informasi tentang kode produksi.



- 2) Dokumen lain antara lain: surat keterangan atau izin usaha dari instansi yang berwenang dan rancangan label pangan.
- b. Penyuluhan Keamanan Pangan
- 1) Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/ Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - 2) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - 3) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.
  - 4) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggungjawab IRTP.
  - 5) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari:
    - a) Materi Utama meliputi: peraturan perundang-undangan di bidang pangan, keamanan dan mutu pangan, teknologi proses pengolahan pangan, prosedur operasi sanitasi yang standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP), Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT), penggunaan bahan tambahan pangan (BTP), persyaratan label dan iklan pangan
    - b) Materi Pendukung meliputi: pencantuman label halal, etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP

6) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan. Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/ peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

7) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

a) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggung jawab yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60)

b) Penomoran sertifikat penyuluhan keamanan pangan adalah sebagai berikut:

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut:

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:

(1) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan.

(3) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.

c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

1) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

- 2) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - 3) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
  - 4) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
  - 5) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I-II maka diberikan SPP-IRT.
- d. Pemberian Nomor P-IRT

Pemberian nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode provinsi, kabupaten dan kota.

- e. Perpanjangan SPP-IRT dan Perubahan Pemilik

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Perubahan Pemilik/ Penanggungjawab Perubahan pemilik/penanggung jawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

f. Pencabutan SPP-IRT

SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- 1) Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku,
- 2) Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan Pangan,
- 3) Pangan mengandung Bahan Berbahaya,
- 4) Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP.

**C. Tinjauan Umum tentang Pangan dalam Kemasan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kemasan yaitu teratur, rapi, dan bersih. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa: “Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik pathogen”. Mencermati definisi tersebut, makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan aman untuk dikonsumsi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu pelaku usaha dalam kegiatan pengemasan makanan perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai kemasan yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Kemasan pangan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 35 adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Mengenai kemasan pangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, tertuang dalam Pasal 16-19. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa:

- a. Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- b. Pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- c. Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar pada Balai Besar POM**

Izin Edar BPOM MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib wajib memiliki Izin Edar BPOM MD. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI, khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan bahan dasar susu, menggunakan bahan tambahan pangan tertentu (seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dan lain-lain), atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai makanan pendamping ASI (MPASI), makanan untuk lansia, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Perizinan diartikan sebagai sebuah perbuatan pemerintah untuk memperkenankan sesuatu yang dilarang oleh sesuatu yang berifat umum. Apabila dihubungkan dengan produk pangan maka pengertian izin mempunyai arti bahwa pemerintah melarang siapapun yang mengedarkan pangan olahan tanpa suatu izin edar sesuai aturan. Izin edar berdasarkan “Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebut persetujuan hasil penilaian pangan olahan dalam rangka peredaran pangan olahan yang diterbitkan oleh

---

<sup>33</sup> <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/1186>, Online tanggal 2 Juni 2021.

kepala BPOM”. Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam mendapatkan izin edar wajib atay harus lebih dahulu melakukan pendaftaran di BPOM Republik Indonesia. BPOM mempunyai peran penting untuk mendeteksi, mengawasi dan mencegah peredaran makanan baik dari dalam maupun luar negeri yang tujuannya melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.

BPOM bertanggung jawab memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi. Informasi yang dilakukan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan peredaran makanan dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Edukasi yang dilakukan BPOM berupa pelatihan atau pembinaan pelaku usaha maupun kelompok usaha agar lebih memahami hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar dalam upaya perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peraturan yang mengatur mengenai perizinan pengedaran produk pangan olahan bersifat hukum publik, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 111 ayat (2):

Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 91:

(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkandalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

- (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangan sebagai kebutuhan utama setiap manusia dan juga sebagai suatu produk yang memerlukan kandukungan sistem pangan yang beretika, jujur, dan bertanggungjawab supaya terpenuhi oleh masyarakat. Pangan berupa suatu bentuk makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan dasar utama manusia yang dipelukan untuk hidup dan bertumbuh kembang. Oleh karena produksi pangan ini di rumah tempat tinggal si pelaku usaha maka setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan diwajibkan agar memenuhi standarisasi pangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan guna tercapainya perlindungan konsumen. Standarisasi sendiri berarti suatu proses penyusunan serta penerapan peraturan untuk kemanfaatan dengan kerjasama dari para pihak yang berkepentingan dalam metode secara teratur untuk aktivitas tertentu, guna meningkatkan penghematan secara menyeluruh dan optimum dengan memperhatikan syarat keamanan.<sup>34</sup> Baik pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga maupun bukan pemenuhan pangan yang bertaraf serta terlindungi adalah cerminan dari hak asasi manusia.

Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur bahwa segala jenis makanan dan

---

<sup>34</sup> Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Paper Plane, 2018, hlm. 73.



minuman yang akan diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar dan syarat kesehatan. Penting untuk mematuhi peraturan ini karena pemenuhan standarisasi oleh pelaku usaha pangan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Bentuk standarisasi ini dapat pula berupa perizinan mengenai pangan yang diproduksinya. Menurut Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan apabila sudah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menentukan bahwa “setiap pangan olahan yang dibuat di dalam maupun di luar negeri (dimpor) wajib mengantongi izin edar apabila diperdagangkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa izin edar dikecualikan untuk olahan pangan yang diproduksi dalam industri rumah tangga. Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan bahwa “kewajiban untuk memiliki izin edar dikecualikan bagi jenis pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga”. Pengertian mengenai pangan olahan tertentu ialah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri yang memiliki tempat usaha dalam tempat tinggal dengan alat-alat pengolahan manual hingga semi otomatis.

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 43 menyebutkan bahwa “setiap pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib mengantongi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap pangan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga pangan”.

Pangan yang dikecualikan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diantaranya “pangan dengan proses sterilisasi komersial atau pasteurisasi, pangan dengan proses pembekuan (*frozen food*) yaitu penyimpanannya memerlukan lemari pembeku, pangan olahan berasal dari hewan yang disimpan dingin atau beku, pangan untuk diet khusus dan pangan untuk keperluan medis khusus seperti MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan pangan untuk penderita penyakit diabetes”. Izin edar meskipun dikecualikan terhadap pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga pangan namun tidak semua pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan dapat memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, terkait dengan pengaturan dan berlakunya izin edar sesuai dengan asas penafsiran hukum, maka pada peraturan tersebut berlaku *asaslex specialis derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Menurut Bagir Manan, “terhadap suatu peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut meskipun dalam peraturan khusus tersebut dapat juga diberlakukan peraturan yang lebih luas”.<sup>35</sup> Dengan demikian mencermati penjelasan tersebut di atas, maka dapat berlaku Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu mengenai pemberlakuan izin edar terhadap makanan atau minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan.

**B. Penerapan Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tanpa Izin Edar untuk Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran pada Putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw**

Menciptakan berbagai inovasi melalui bermacam bentuk kreasi industri rumahan, salah satunya bisnis yang paling banyak dilakukan adalah di sektor makanan dan minuman. Kegiatan makana merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar. Pangan harus aman, bergizi, dan bermutu karena sangat penting perannya bagi perkembangan tumbuh, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi

---

<sup>35</sup> Manan, Bagir, *Hukup Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, 2004, hlm. 58.

masyarakat. Adanya pengawasan keamanan terhadap pangan dapat melindungi masyarakat dari makanan yang mungkin berbahaya dan/atau membahayakan kesehatan. Terwujudnya pangan adalah sebagian dari terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komponen utama guna menciptakan mutu sumber daya manusia, dan keterlibatan Negara di dalamnya sangat penting.

Syarat utama adalah tentu tentang perizinan. Izin sebagai syarat utama penting untuk dijadikan sebagai jaminan bahwa olahan baik industri rumah tangga ataupun bukan yang dijual telah sesuai dengan standar produk pangan yang berlaku. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dari berbagai kerugian serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab maka produk olahan kemasan yang diperjualbelikan harus mempunyai izin edar. Namun apabila produk pangan olahan tidak mempunyai izin edar dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum karena produk tidak memenuhi standar kualitas yang disyaratkan.

Salah satu tindak pidana terkait dengan produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang diisyatkan dan tidak memiliki izin edar yaitu perkara nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Slw. Pada perkara tersebut Terdakwa Nur Maghfirotus Sholikha Als Ika Binti Heri Asari memiliki usaha jualan secara Online dengan nama Asyarie Shop dengan barang-barang yang dijual yaitu madu, susu termasuk susu kambing merk etawa yang terdakwa produksi sendiri dengan mulai produksi susu kambing etawa semula terdakwa mencoba sendiri dengan mengambil referensi dari internet kemudian setelah

mendapatkan formula yang pas menurut terdakwa. Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali produksi dan setiap kali produksi menghasilkan 1.300 (seribu tiga ratus) dos dengan varian original, vanilla, coklat dan capucino dan terdakwa distribusikan dengan cara online dengan jasa pengiriman JNE ke daerah Jawa Timur, Tangerang, Tegal dan Brebes. Terdakwa melalui karyawannya melakukan pengemasan terhadap produk AUMOM susu kambing Etawa yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang dengan mencantumkan Nomor BPOM Reg. 60311001204 yang merupakan nomor fiktif karena seharusnya nomor izin yang tercantum di dalam label adalah POM MD kemudian diikuti 12 kombinasi nomor dari Badan POM. Setelah Petugas BBPOM Jateng, Semarang mengecek melalui website Badan POM RI tidak menemukan produk AUMOM susu kambing Etawa yang terdakwa produksi.

Saat pemeriksaan di rumah tinggal terdakwa di jalan Prof M. Yamin, Pasar Batang, Brebes, menemukan Aumom Susu Kambing Etawa tanpa izin edar:

Tabel 1. Aumom Susu Kambing Etawa Tanpa Izin Edar

No	Nama Barang	Jumlah
1	Aumom Susu Kambing Etawa Rasa Vanilla	219 Kotak
2	Aumom Susu Kambing Etawa Rasa Coklat	608 Kotak
3	Aumom Susu Kambing Etawa Rasa Original	246 Kotak
4	Aumom Susu Kambing Etawa Rasa Capucino	56 Kotak
5	Leaflet Aumom Susu Kambing Etawa	15 Rim
6	Kemasan sekunder Aumom	20 Lembar
7	Spanduk Agen Aumom	5 Lembar
8	Buku Stok (mutasi)	1 Buah
9	Resi Pengiriman	1 Bendel

Bersamaan dengan petugas BBPOM lainnya melakukan pemeriksaan produk pangan di rumah kontrakan terdakwa di Wangandawa RT.07 RW.02 Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menemukan produk pangan berupa susu kambing Etawa merk “AUMOM” tanpa izin edar:

1. Produk Jadi	Jumlah
Aumom Susu Kambing Etawa	1.070 dus
2. Bahan Baku	
Java Cocoa Powder	12 bungkus
3. Alat Produksi	
a. Mesin Pres	1 unit
b. Mesin Koding	1 unit
c. Timbangan Digital	2 unit
d. Bak Putih	1 unit
e. Keranjang	3 unit
f. Baskom Kecil	1 unit
g. Centong Kayu	4 unit
h. Centong Plastik	3 unit
4. Kemasan	
a. Kemasan Sekunder (dus)	9 ikat
b. Kemasan Primer (al foil)	1 karton

Produk susu kambing Etawa merk “AUMOM” di atas tanpa izin edar berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: 0004/P/DK/18/KM, 0005/P/DK/18/KM tanggal 11 April 2018 dan Nomor: 0006/P/DK/18/KM,

0007/P/DK/18/KM tanggal 12 April 2018 dengan kesimpulan “Tidak Memenuhi Syarat” dengan jumlah hasil uji masih sangat jauh dari keterangan yang tertera di label, sehingga sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat terutama ibu hamil. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 142 UURI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Berdasarkan informasi yang tertulis pada kemasan produk susu kambing Etawa merk “AUMOM” dalam kemasan terdapat gambar Ibu hamil, maksud dari gambar tersebut menyatakan bahwa produk susu “AUMOM” diperuntukkan untuk ibu hamil, namun dalam tanda kurung tertulis bisa dikonsumsi selain ibu juga ayah. Hal ini sangat membingungkan konsumen. Menurut Ahli, pada kemasan susu tersebut juga tertulis “Awal kehamilan” dan “Busui” yang artinya bahwa produk tersebut sebenarnya hanya dapat dikonsumsi untuk usia kehamilan dari 0 bulan sampai 4 bahkan 5 bulan sedangkan ibu menyusui adalah pasca kehamilan, dan kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dan ibu menyusui adalah berbeda, sehingga hal ini membingungkan dan menyesatkan bagi konsumen. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 UURI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 ada petugas dari Balai Besar POM Semarang melakukan pemeriksaan di rumah/gudang/

bangunan alamat Jl.M Yamin RT.03 RW.04 Pasarbatang, Brebes dan menemukan produk susu merek “Aumom” Susu kambing etawa dengan beberapa varian, leaflet, kemasan sekunder aumom, spanduk agen aumom, buku stock dan resi pengiriman.

2. Bahwa benar produk susu kambing etawa merek “Aumom” yang ditemukan diakui milik Terdakwa.
3. Bahwa benar yang melakukan produksi Susu Kambing Etawa “Aumom” adalah para karyawan atas perintah Terdakwa.
4. Bahwa benar jumlah karyawannya ada enam orang, satu orang sebagai kepala produksi dan yang 5 (lima) orang membantu kepala produksi.
5. Bahwa benar karyawan biasa digaji Rp.85.000,- per hari sedangkan kepala produksi digaji Rp.100.000,- perhari dan yang menggaji karyawan adalah Terdakwa sendiri.
6. Bahwa benar proses produksi susu kambing etawa merek “Aumom” dilakukan di rumah kontrakan yang beralamat di Wangandawa RT.07 RW.02 Kec. Talang, Kab. Tegal.
7. Bahwa benar rumah kontrakan yang beralamat di Wangandawa RT.07 RW.02 Kec.Talang, Kab.Tegal yang digunakan untuk memproduksi susu kambing etawa “Aumom” belum memiliki izin memproduksi Susu kambing etawa.
8. Bahwa benar rumah kontrakan yang beralamat di Wangandawa RT.07 RW.02 Kec.Talang, Kab.Tegal yang mengontrak adalah Terdakwa sendiri



dengan biaya kontrak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

9. Bahwa benar formula produk Susu Kambing Etawa “Aumom” adalah hasil percobaan Terdakwa sendiri dengan referensi diambil dari internet sampai mendapatkan formula yang paling pas dan akhirnya dibuat patokan untuk produksi.
10. Bahwa benar Terdakwa memproduksi “Aumom” susu kambing etawa sejak sebulan yang lalu, dalam satu bulan sudah tiga kali produksi, sekali produksi menghasilkan 1.300 (seribu tiga ratus) dus/kemasan dengan varian original, vanilla, coklat dan capucino.
11. Bahwa benar produk susu tersebut dijual dengan cara online dengan jasa pengiriman JNE, costomernya ada di Jawa timur, Tangerang, Tegal dan Brebes.
12. Bahwa benar Customer melakukan pemesanan lewat internet, setelah costomer melakukan pembayaran via transfer bank kemudian produk yang dipesan dikirim via JNE.
13. Bahwa benar harga per dos untuk reseller sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian reseller menjual lagi ke konsumen akhir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per dus.
14. Bahwa benar keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa setelah dipotong biaya produksi hanya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per dus.
15. Bahwa yang melakukan pengadaan bahan baku termasuk susu, krimmer, kemasan dus, spanduk, dan leaflet adalah Terdakwa sendiri sedangkan

cokelat bubuk dan gula pasir dipesan oleh Saksi ARIEF selaku karyawan atas perintah Terdakwa.

16. Bahwa benar untuk creamer dan aluminium foil dipesan melalui online oleh Terdakwa sendiri sedangkan dus kemasan dipesan dipercetakan di daerah Tegal oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar pada produk “Aumom” Susu Kambing Etawa sengaja dicantumkan Nomor BPOM Reg.60311001204 itu adalah nomor fiktif supaya meyakinkan konsumen saja.
18. Bahwa benar Terdakwa memang berencana membuat CV dengan nama Azira Berkah Mandiri namun izinnya belum selesai diurus.
19. Bahwa benar Arif Hidayat adalah pemilik toko burung yang juga suami terdakwa, sedangkan Nur Ahmad Arif adalah kakak kandung terdakwa dan ARIF adalah pemilik kontrakan. Sedangkan Eko Ariefiyanto adalah salah satu karyawan yang membantu pembuatan susu kambing Etawa.
20. Bahwa benar pengisian tanggal kedaluwarsa adalah terdakwa isi dengan tanpa dasar karena hanya mengikuti pada produk susu lain, hal ini hanya untuk meyakinkan konsumen saja.
21. Bahwa benar kerugian yang diderita akibat disitanya barang-barang milik Terdakwa oleh Penyidik Balai Besar POM Semarang adalah kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
22. Bahwa benar Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya memproduksi dan memperjualbelikan produk susu kambing etawa AUMOM tanpa dilengkapi dengan ijin edar.

Dipersidangan dalam penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan dakwaan kumulatif. dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan dakwaan kedua Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama yaitu Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha pangan;
2. dengan sengaja tidak memiliki izin edar;
3. terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) yang menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Dakwaan kedua yaitu Pasal 144, UURI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang menyatakan setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Hasil pemeriksaan dan berdasarkan pertimbangan hakim atas unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum semua unsur baik dari Pasal 142 maupun Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua yaitu menyatakan Nur Maghfirotus Sholikha als. Ika Binti Heri Asari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label.

Hakim berpendapat bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ancaman pidananya bersifat alternatif atau dapat dijatuhkan salah satu dari pidana yang diancamkan, yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Maghfirotus Sholikha als. Ika Binti Heri Asari dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainyaa yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan. Produksi pangan merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Sedangkan peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

Ijin edar pangan diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan namun tidak ada definisi secara eksplisit tentang ijin edar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi pangan yang dimaksud ijin edar adalah Surat Persetujuan Pendaftaran. Definisi ijin edar tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 Tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung

alkohol, yaitu bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Produk-produk Susu kambing etawa merek “AUMOM” pada perkara nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Slw dalam daftar barang bukti adalah termasuk dalam kategori Pangan. Maka untuk dapat diedarkan produk pangan berupa Susu Kambing Etawa “Aumom” harus mendapatkan persetujuan pendaftaran dari Badan POM RI berupa nomor registrasi MD (Makanan Dalam) yang diikuti 12 (duabelas) digit berupa kombinasi angka. Mengedarkan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan barang baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan. Jadi untuk mengetahui suatu produk Pangan sudah mempunyai ijin edar yaitu dalam label/etiket sudah mencantumkan Nomor Pendaftaran dengan tulisan POM RI MD. dan kombinasi angka 12 (duabelas) digit untuk produk dalam negeri sedangkan untuk produk luar negeri dengan tulisan POM RI ML dengan kombinasi angka 12 (dua belas) digit. Untuk kepastiannya dapat dilihat di Website Badan POM yang bias diakses oleh masyarakat umum. Dari data mobile tersebut dapat diketahui nama Industri yang mendaftarkan, nama produk, alamat industri, nama produk/macam barang jumlah dan kemasan, bentuk produk, nomor registrasi serta komposisi.

Susu kambing etawa merek “AUMOM” pada perkara nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Slw adalah benar tanpa Ijin edar tidak diketahui

kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanan serta kemanfaatannya, suatu misal “Aumom” Susu kambing Etawa di dalam kemasan produk mengklaim “Nutrisi Persiapan Kehamilan dengan kandungan Tinggi Asam Folat, Serat Pangan, Vit.E dan Tinggi Kalsium. Isi harus sesuai dengan komposisi yang tertera dalam label atau kemasan sehingga jaminan klaim tersebut bisa dipertanggungjawabkan. oleh karena itu apabila produk tersebut diproduksi tidak sesuai dengan standar aturan yang ada (diproduksi asal asalan) maka produk Susu Tanpa Ijin Edar akan sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat terutama Ibu Hamil karena produk tersebut ditujukan untuk Ibu Hamil yang memang sangat membutuhkan nutrisi tersebut agar Janin bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Pangan TIE yaitu produk makanan yang belum mendapatkan persetujuan ijin edar dari Badan POM RI berupa registrasi pendaftaran (MD) untuk produk dalam negeri dan (ML) untuk produk Pangan yang berasal dari luar negeri, tanpa persetujuan ijin edar tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dilarang memproduksi pangan untuk diperdagangkan makanan yang tidak terdaftar, baik makanan lokal maupun import, karena produk Tanpa ijin Edar tersebut belum dievaluasi dan dinilai keamanan, mutu dan kemanfaatannya.

CV Azira Berkah Mandiri adalah nama perusahaan yang memproduksi produk Susu Kambing Etawa “Aumom” tersebut yang beralamat di Tegal-Jawa Tengah, sedangkan BPOM RI REG 603111001204 adalah nomor registrasi yang seolah olah resmi dari Badan POM RI. Setelah di cek melalui

website Badan POM (Cek BPOM) nama perusahaan tersebut tidak ada dan nomor registrasi yang tercantum dalam kemasan tersebut adalah milik perusahaan lain yaitu CV Halt Manufactur yang memproduksi Susu Kambing merek “RBM” yang beralamat di Kab.Tegal. Jadi nomor registrasi yang tercantum dalam kemasan tersebut adalah milik perusahaan lain yaitu CV Halt Manufactur dengan produk Susu Kambing merek “RBM” yang beralamat di Kab.Tegal Sedangkan nama perusahaan yang tercantum didalam kemasan adalah tidak benar atau tidak ada, jadi nama produsen dan nomor pendaftaran produk pangan yang tercantum didalam kemasan Susu Kambing Etawa merek “Aumom” adalah fiktif. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa produk tersebut belum terdaftar (TIE).

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa majelis hakim sudah benar dalam menerapkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu Sdri. Nur Maghfirohtus Sholikha alias Ika binti Heri Asari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Terkait dengan pengaturan dan berlakunya izin edar sesuai dengan asas penafsiran hukum, maka pada peraturan tersebut berlaku *asaslex specialis derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengeyampingkan hukum yang bersifat umum walaupun susu kambing etawa “Aumom” yang diproduksi terdakwa merupakan produk industri rumah tangga pangan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum memproduksi pangan tanpa izin edar pada Balai Besar POM yang bersifat publik di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91.
2. Penerapan tindak pidana memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada putusan No. 13/Pid.Sus/2019/PN Slw, majelis hakim sudah benar dalam menerapkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu Sdri. Nur Maghfirohtus Sholikha alias Ika binti Heri Asari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi pangan tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Terkait dengan pengaturan dan berlakunya izin edar sesuai dengan asas penafsiran hukum, maka pada peraturan tersebut berlaku *asaslex specialis derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengeyampingkan hukum yang bersifat umum walaupun susu kambing etawa “Aumom” yang diproduksi terdakwa merupakan produk industri rumah tangga pangan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan kemasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Upaya yang dilakukan dengan melakukan pengawasan *pre market kontrol*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan di masyarakat dan pengawasan *post market kontrol*, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat.
2. Perlunya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan dalam kemasan, karena isi produk harus sesuai dengan komposisi yang tertera dalam label atau kemasan sehingga jaminan klaim tersebut bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar aturan yang ada.
3. Sanksi hukum yang diberikan agar lebih berat dari pada apa yang sudah diputus pada putusan pada hasil pembahasan sebelumnya, agar dapat memberikan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Amiruddin dan Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ariman, M. Rasyid dan Raghil, Fahmi., *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ariman, M. Rasyid, dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2007.
- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gunaidi, Ismi dan Efendi, Joenadi., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- Kanza, Aulia & Umar, Sukma Chaedir, *Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*, Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, 2004.
- Muhammad, Abdukadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Paper Plane, 2018.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

#### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

#### **Jurnal/Artikel/Internet:**

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/563/3-2-Miliar-Rupiah-Obat-Tradisional-dan-Pangan-Olahan-Ilegal-Ditemukan-di-Bekasi.html>, Online tanggal 2 Februari 2021.

<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/1186>, Online tanggal 2 Februari 2021.

Ilat, Rivalno Daniel, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”, *Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Jan-Maret 2015*:114-122.

Lestari, Desy., Suradi, & Njatrijani, Rinitami, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beradar di Pasaran, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013:1-11.

Nasution, Saripa Hannum, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, *Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 1, Desember 2020*:65-79.

Nurcahyo, Edy, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 3, September 2018*.

Nurcahyo, Edy, Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 3, September 2018*:402-417.

Pakpahan, Kartina., Leviyanti., Widiyani, Heni,m dan Chandra, Ferris., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Ius Civile, Vol. 4, No. 1, April 2020*:1-12.

Pamory, Novri Dimas, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4. No 2, Maret 2016.

Suriati, Eni., Darmawan, & Mansur, Teuku Muttaqin, “Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, Desember 2018:502-503.